JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 2 Maret 2026 | **Revised**: 27 Maret 2026 | **Accepted**: 9 April 2026

Dinamika *Greed and Grievance*: Analisis Pengaruh Kelompok Bersenjata Terhadap Keamanan Nasional Republik Demokratik Kongo (2021-2025)

Wa Ode Irma Yanti[1], Etik Siswatiningrum[2], Agfajrina Cindra Pamungkas[3]
[1]Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pendidikan Muhammadiyah, Sorong, Indonesia, waodeirmayanti06@gmail.com
[2]Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pendidikan Muhammadiyah, Sorong, Indonesia, etik.siswati22@gmail.com
[3]Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pendidikan Muhammadiyah, Sorong, Indonesia, agfajrinaunimuda@gmail.com

Corresponding Author: waodeirmayanti06@gmail.com

Abstract: *This research analyzes the influence of armed group dynamics on the national security stability of the Democratic Republic of the Congo (DRC) for the 2021-2025 period using Paul Collier and Anke Hoeffler's Greed and Grievance theoretical framework, as well as Barry Buzan's concept of Comprehensive Security. The DRC is a country rich in natural resources yet trapped in a "resource curse" and prolonged conflict. Employing a qualitative descriptive method, this study focuses its analysis on three major armed groups: the March 23 Movement (M23), the Allied Democratic Forces (ADF), and the Cooperative for the Development of the Congo (CODECO). The results indicate that the conflict in the DRC is fueled by a combination of economic greed (Greed) through the control of illegal mineral mines such as gold and coltan, and socio-political resentment (Grievance) rooted in historical wounds and ethnic discrimination. The escalation of violence during this period has resulted in a severe humanitarian crisis, the paralysis of state sovereignty in the eastern region, and threats to the DRC's national security across military, political, economic, and social dimensions.*

Keyword: *Democratic Republic of the Congo, Greed and Grievance, National Security, Armed Groups,*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pengaruh dinamika kelompok bersenjata terhadap stabilitas keamanan nasional Republik Demokratik Kongo (RDK) pada periode 2021-2025 dengan menggunakan kerangka teori *Greed and Grievance* dari Paul Collier dan Anke Hoeffler, serta konsep Keamanan Komprehensif dari Barry Buzan. Republik Demokratik Kongo merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam namun terjebak dalam "kutukan sumber daya" dan konflik berkepanjangan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, studi ini memfokuskan analisis pada tiga kelompok bersenjata utama: *March 23 Movement* (M23),

Allied Democratic Forces (ADF), dan *Cooperative for the Development of the Congo* (CODECO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik di RDK dipicu oleh perpaduan antara keserakahan ekonomi (*Greed*) melalui penguasaan tambang mineral ilegal seperti emas dan koltan, serta dendam sosial-politik (*Grievance*) yang berakar pada luka sejarah dan diskriminasi etnis. Eskalasi kekerasan pada periode ini telah mengakibatkan krisis kemanusiaan yang hebat, lumpuhnya kedaulatan negara di wilayah timur, serta mengancam keamanan nasional RDK dalam dimensi militer, politik, ekonomi, dan sosial.

Kata Kunci: Republik Demokratik Kongo, *Greed and Grievance*, Keamanan Nasional, Kelompok Bersenjata.

PENDAHULUAN

Republik Demokratik Kongo (RDK) adalah negara terbesar ke-11 di dunia dan terbesar ke-2 di benua Afrika. Negara ini memiliki banyak sumber daya alam, dengan komoditas utama berlian, emas, kobalt, dan tembaga. RDK juga merupakan negara hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia, dengan Taman Nasional Virunga sebagai taman nasional tertua di benua Afrika dan gunung berapi paling berbahaya di dunia (Gulo et al., 2024). Negara yang kaya akan sumber daya tetapi tidak dengan kehidupannya, negara ini penuh akan konflik dan sejarah yang sangat kelam. Paradoks kekayaan (Kekayaan alam yang seharusnya menyejahterakan malah menjadi alasan utama terjadinya konflik berkepanjangan), alam RDK menciptakan insentif ekonomi bagi kelompok bersenjata, alih-alih kemakmuran, keberadaan mineral kritis justru menjadi bahan bakar konflik yang melanggengkan kekerasan demi penguasaan tambang ilegal.

Terbentuknya Republik Demokratik Kongo (RDK) berawal dari ambisi Raja Leopold II untuk menjadikan Belgia kekuatan kekaisaran melalui kolonisasi cekungan Sungai Kongo, yang menghasilkan Negara Bebas Kongo (1885–1908) sebagai koloni pribadi dengan catatan kejahatan kemanusiaan dan eksploitasi ekonomi yang masif di sektor perkebunan serta pertambangan mineral. Setelah periode panjang pemerintahan era Loepold II dan tekanan internasional dari PBB, Kongo akhirnya meraih kemerdekaan pada 30 Juni 1960 dengan Patrice Lumumba sebagai Perdana Menteri dan Joseph Kasavubu sebagai Presiden, sebuah pencapaian yang juga dipengaruhi oleh semangat Konferensi Asia Afrika 1955 (Britannica.com, 2025). Namun, pascakemerdekaan, negara ini segera terjerat konflik internal akibat pemberontakan dari tentara *Force Publique* yang tidak puas dengan kondisi, gaji, dan pangkat mereka, serta gerakan separatisme (memisahkan diri) di Katanga, yang memaksa pemerintah Kongo meminta bantuan internasional. Hal ini mendorong Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammarskjold untuk menginisiasi misi perdamaian *Opération des Nations Unies au Congo* 1960-1964 (ONUC) pada 13 Juli 1960 guna menarik pasukan Belgia dan memulihkan stabilitas nasional, menjadikannya salah satu intervensi PBB paling signifikan di Afrika pascakolonial.

Konflik berkepanjangan di Republik Demokratik Kongo (RDK) yang berakar sejak tahun 1996 dipicu oleh ketidakstabilan politik, ketegangan etnis antara Tutsi dan Hutu, serta perebutan sumber daya alam melimpah seperti berlian, emas, kobalt, dan tembaga. Fase awal konflik (1996-1997) berhasil menjatuhkan Presiden Mobutu dan mengangkat Laurent Desire Kabila, namun ketidakmampuan Kabila membagi kekuasaan memicu perang besar kedua (1998-2003) yang melibatkan intervensi militer dari berbagai negara Afrika seperti Rwanda, Uganda, Angola, hingga Zimbabwe (Titi, 2024). Meski perjanjian damai telah ditandatangani pada 2003, ketidakstabilan tetap berlanjut akibat pemerintahan yang korupsi dan eksploitasi sumber daya yang memicu munculnya 122 kelompok bersenjata non-negara pada periode 2021-2024, termasuk kelompok utama seperti *Allied Democrat Force* (ADF), *Cooperative for the Development of the Congo* (CODECO), dan *March 23 Movement* (M23). Keterlibatan

Rwanda yang mendukung M23 dengan dalih perlindungan etnis Tutsi dan keamanan perbatasan semakin memperkeruh situasi di Kongo Timur, di mana rangkaian serangan kekerasan dan pengeboman telah menelan lebih dari 5.000 korban jiwa sipil hanya dalam kurun waktu 2021-2022, menciptakan penderitaan kemanusiaan yang mendalam bagi masyarakat setempat (Gulo et al., 2024).

Konflik di wilayah timur Republik Demokratik Kongo (RDK) didominasi oleh pergerakan kelompok Bersenjata seperti M23, ADF, dan CODECO, di mana *March 23 Movement* (M23) atau Gerakan 23 Maret dibentuk pada tahun 2012 oleh sekitar 300 tentara bekas anggota CNDP yang memberontak karena mengeluhkan perlakuan buruk di militer FARDC. Beroperasi di provinsi Kivu Utara, kelompok ini mengklaim memperjuangkan hak-hak etnis Tutsi di Kongo. Pada akhir 2012, M23 melancarkan serangan dan berhasil merebut kota Goma serta beberapa kota lain, namun pasukan PBB dan FARDC memukul mundur mereka pada 2013. M23 bangkit kembali pada 2022 dengan serangan-serangan agresif yang menyebabkan perebutan wilayah strategis di Kivu (Lawal, 2024). Laporan *Human Rights Watch* tahun 2024 menyoroti krisis kemanusiaan yang memburuk akibat serangan secara sembarangan menembakkan artileri (Peluruh besar, roket, atau rudal) ke kamp pengungsian dan area padat penduduk dekat Goma oleh pasukan M23 dan militer Rwanda ke kamp-kamp pengungsian di sekitar Goma, termasuk serangan fatal pada 3 Mei yang menewaskan sedikitnya 17 warga sipil, termasuk 15 anak-anak di kamp pengungsian di lingkungan Lac Vert dan Mugunga. Sementara itu, pasukan pemerintah RDK (FARDC) dan milisi sekutunya, Wazalendo, juga menimbulkan risiko bagi warga pengungsi dengan menempatkan posisi artileri dekat kamp serta melakukan penembakan, pembunuhan, dan pelecehan seksual terhadap penduduk kamp (Hrw.org, 2024).

Selain M23 ada juga dua kelompok bersenjata yang cukup aktif, yaitu ADF dan CODECO, yang memiliki latar belakang serta motif berbeda namun sama-sama berdampak fatal bagi warga sipil. ADF (*Allied Democratic Forces*), yang didirikan di Uganda pada tahun 1996 dengan misi awal membentuk negara Islam dan telah menggeser operasionalnya ke timur RDK dan berafiliasi dengan ISIS, hingga menjadi kelompok paling mematikan pada tahun 2024 dengan catatan lebih dari 1.600 korban jiwa melalui aksi pembantaian dan penculikan (Serwat, 2025). Di sisi lain, CODECO (*Cooperative for the Development of Congo*) yang awalnya merupakan koperasi pertanian etnis Lendu sejak 1999, bertransformasi menjadi kelompok militan yang aktif kembali sejak 2017 untuk menyerang etnis Hema dan menguasai tambang emas di wilayah Ituri (Lawal, 2024).

Kebijakan *State of Siege* (Darurat Militer) yang diberlakukan pemerintah RDK di Kivu Utara dan Ituri sejak Mei 2021 dinilai gagal meredam kekerasan karena kelompok bersenjata justru membuat serangan sebagai respons terhadap tekanan militer (International, 2022), yang kemudian memuncak pada kebangkitan kembali kelompok M23 sepanjang 2022-2023 dengan penguasaan wilayah strategis seperti Bunagana dan Kitshanga serta memicu ketegangan diplomatik hebat dengan Rwanda (Hrw.org, 2024). Memasuki periode 2024 hingga awal 2025, dinamika keamanan semakin memburuk dan terfragmentasi (tidak terorganisir), ditandai dengan pembantaian warga sipil di kamp pengungsian oleh kelompok CODECO demi kontrol pertambangan emas, perluasan teror ideologi transnasional oleh ADF yang berafiliasi dengan ISIS (UN Security Council, 2024), hingga mencapai titik nadir (titik terendah) pada Januari 2025 saat M23 meluncurkan serangan skala besar yang berhasil menembus pertahanan kota Goma (Devine, 2025). Serangan yang diduga kuat didukung oleh pasukan Rwanda (RDF) ini mengakibatkan jatuhnya sedikitnya 2.900 korban jiwa, pengungsian massal lebih dari 480.000 warga, serta kelumpuhan infrastruktur vital seperti bandara dan listrik, yang pada akhirnya menegaskan bahwa evolusi kelompok bersenjata telah menjadi ancaman eksistensial bagi kedaulatan nasional RDK dan memicu kerusuhan massa di ibu kota Kinshasa (Ohchr.org, 2025).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gulo et.al (2024), yang berjudul "Peran Negara dan MONUSCO dalam pemenuhan Keamanan Personal Masyarakat Republik Demokratik Kongo Tahun 2021-2022", mencatat bahwa selama periode 2021-2022, eskalasi kekerasan oleh kelompok bersenjata seperti M23,ADF,CODECO telah menyebabkan krisis kemanusianan yang hebat, dengan jumlah korban jiwa memcapai lebih dari 5.000 jiwa. Sedangkan menurut laporan UN Security Council tahun 2024, konflik eksploitasi mineral strategis di wilayah timur, di mana kelompok bersenjata seperti M23 dan CODECO memanfaatkan kontrol atas tambang emas dan coltan sebagai mesin ekonomi utama untuk mendanai operasional militer mereka (Gulo et al., 2024). Dan Dalam penelitian Paolo Pizzolo dengan judul "*The Greed versus Grievance Theory and the 2011 Libyan Civil War: Why grievance offers a wider perspective for understanding the conflict outbreak"* pada tahun 2020, Paolo berargumen bahwa meskipun faktor *Greed* melalui kontrol cadangan minyak berkontribusi pada mobilisasi pemberontak di Libya, memberikan keluhan perspektif yang lebih luas dan komprehensif untuk memahami pecahnya konflik tersebut. Hal ini dikarenakan rezim Gaddafi memicu kebencian mendalam melalui ketimpangan distribusi pendapatan, pengangguran, kurangnya hak politik, nepotisme, korupsi, serta marginalisasi sistematis terhadap kelompok etnis tertentu seperti Toubou melalui kebijakan "Arabisasi". Paolo menyimpulkan bahwa teori *Grievance* lebih mampu menangkap realitas penderitaan kolektif masyarakat Libya yang teralienasi, sedangkan motif *Greed* lebih relevan untuk menganalisis kepentingan aktor internasional dalam intervensi militer disana (Pizzolo, 2020).

Sedangkan Dalam penelitian Paul Collier dan Anke Hoeffler (2000) dengan judul "*Greed and Grievance in Civil War*", dimana argumen mereka bahwa konflik lebih sering dipuci oleh faktor ekonomi (Greed) daripada sekedar keluhan sosial atau politik (Grievance). Melalui analisis ekonometrik, mereka menyimpulkan bahwa ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan ketergantungan pada ekspor komoditas primer meningkatkan peluang konflik karena menyediakan peluang finansial bagi kelompok pemberontak untuk mempertahankan operasioal mereka (Collier, 2000).

Teori *Greed-Grievance* dari Paul Collier dan Anke Hoeffler menjelaskan bahwa perang sipil dipicu oleh dua motivasi utama, yaitu keserakahan ekonomi *(greed*) dan keluhan sosial (*grievance*). Dalam model *greed*, kelompok pemberontak dianggap sebagai organisasi kriminal yang memanfaatkan kekayaan alam, seperti berlian dan emas, untuk mendanai operasional mereka dan risiko konflik ini memuncak ketika suatu negara sangat bergantung pada ekspor komoditas primer. Di sisi lain, model *grievance* melihat konflik sebagai luapan kebencian akibat ketidakadilan etnis dan politik (Collier, 2000). Di Republik Demokratik Kongo (RDK), kedua faktor ini saling berhubungan erat dengan kekayaan alam yang melimpah tetapi justru menjadi bahan bakar konflik yang berkepanjangan, sementara sentimen etnis dan sejarah kekerasan memperburuk kondisi keamanan warga sipil di sana.

Melengkapi pandangan tersebut, Barry Buzan melalui konsep Keamanan Komprehensif memperluas definisi keamanan melampaui sekadar kekuatan militer. Buzan berargumen bahwa negara lemah sering kali menghadapi ancaman bukan dari luar, melainkan dari dalam negeri sendiri akibat rendahnya kohesi sosial (tingkat kepercayaan antar masyarakat) dan hilangnya legitimasi (kepercayaan) tehadap pemerintah. Dalam keamanan nasional mencakup lima sektor vital: militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kegagalan negara dalam mengelola sumber daya strategis (ekonomi) dan menjaga identitas kolektif masyarakat (sosial) menciptakan kerentanan yang dapat melumpuhkan struktur negara secara keseluruhan (Buzan, 1991). Oleh karena itu, konflik di RDK tidak hanya masalah peperangan fisik, tetapi juga merupakan manifestasi dari rapuhnya kedaulatan dan stabilitas institusional negara tersebut.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa stabilitas keamanan nasional RDK tidak hanya terganggu oleh perebutan sumber daya ekonomi (*Greed*) seperti tambang emas dan coltan,

tetapi juga berakar pada luka sejarah dan ketidakadilan sosial-politik antar etnis (*Grievance*) yang belum terselesaikan. Ketumpangtindihan antara motif ekonomi dan keluhan sosial inilah yang membuat konflik di RDK pada periode 2021-2025 menjadi semakin kompleks dan sulit diredam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab konflik dan dampaknya terhadap kedaulatan serta keamanan masyarakat RDK pada periode 2021 hingga 2025, periode dimana terjadi intensifikasi konflik dengan adanya kurang lebih 122 kelompok bersenjata, termasuk kelompok utama seperti M23, ADF, dan CODECO, yang menyebabkan ribuan korban jiwa dan penderitaan besar bagi masyarakat sipil di wilayah timur RDK. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah**: "Bagaimana pengaruh dinamika *Greed* dan *Grievance* kelompok bersenjata terhadap stabilitas keamanan nasional RDK tahun 2021-2025?".**

METODE

Deskriptif kualitatif merupakan istilah dalam penelitian kualitatif yang mengacu pada studi bersifat deskriptif, sering digunakan pada fenomenologi sosial. Pendekatan ini terfokus untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait siapa, apa, di mana, dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi, kemudian dikaji secara mendalam guna menemukan pola-pola yang muncul. Secara singkat, deskriptif kualitatif adalah metode penelitian kualitatif sederhana dengan alur induktif, di mana penelitian dimulai dari proses atau peristiwa penjelas yang akhirnya menghasilkan generalisasi sebagai kesimpulan dari peristiwa tersebut (Yuliani, 2018).

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis pengaruh kelompok bersenjata seperti M23, ADF, dan CODECO terhadap keamanan nasional Republik Demokratik Kongo (RDK) pada periode 2021-2025, dengan fokus menggambarkan secara rinci fenomena konflik, dinamika *greed-grievance*, dan dampaknya terhadap kedaulatan negara melalui narasi mendalam. Pendekatan ini bersifat induktif, dimulai dari data empiris spesifik seperti serangan di Kivu Utara dan Ituri untuk menemukan pola umum seperti eksploitasi mineral dan konflik etnis, sesuai karakteristik deskriptif kualitatif yang menjawab apa, bagaimana, dan mengapa suatu peristiwa terjadi tanpa generalisasi statistik (Yuliani, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka sistematis dari sumber sekunder, termasuk laporan *Human Rights Watch* tentang korban sipil di Goma, dokumen PBB, jurnal akademis, serta artikel berita kredibel tentang aktivitas kelompok bersenjata pada 2021-2025. Teknik ini memastikan triangulasi sumber untuk validitas, dengan pencarian kata kunci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Republik Demokratik Kongo (*République Démocratique du Congo*) merupakan negara di Afrika Tengah yang dikelilingi oleh sembilan negara tetangga, yaitu Angola, Republik Kongo, Republik Afrika Tengah, Sudan, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, dan Zambia. Selain berbatasan darat, negara ini juga memiliki akses sempit ke Samudra Atlantik di sisi barat daya (aacrao.org, 2025). Republik Demokratik Kongo (RDK) merupakan negara di Afrika Tengah yang memiliki kekayaan alam luar biasa, seperti emas, berlian, tembaga, dan kobalt (bahan utama baterai ponsel), yang seharusnya dapat menjadikannya salah satu negara terkaya di dunia. Namun, kenyataannya RDK justru menjadi salah satu negara termiskin akibat sejarah eksploitasi kolonial yang kelam, korupsi yang meluas, serta konflik bersenjata yang berkepanjangan selama puluhan tahun. Meskipun kaya akan sumber daya dan memiliki hutan hujan tropis yang luas, masyarakatnya masih menghadapi penderitaan kemanusiaan yang mendalam dan ketidakstabilan politik yang menghambat kemakmuran bangsa tersebut (bbc.com, 2025).



Gambar 1. Peta Republik Demokratik Kongo (istockphoto)

Dinamika Kelompok Bersenjata Di RDK (2021-2025)

Pada periode 2021-2024, tercatat 122 kelompok bersenjata non-negara aktif, dengan tiga kelompok utama yakni *Allied Democrat Force* (ADF), *Cooperative for the Development of the Congo* (CODECO), dan *March 23 Movement* (M23), yang melakukan serangkaian serangan kekerasan, dan pengeboman.

March 23 Movement (*M23)*

Kelompok *March 23 Movement* (M23) kembali muncul sebagai aktor dominan di wilayah Timur Republik Demokratik Kongo (RDK) sejak akhir 2021, setelah sempat vakum selama hampir satu dekade. Secara historis, asal-usul kelompok ini berakar pada tahun 2012, di mana pembentukannya dipicu oleh pembangkangan mantan anggota *Congrès National pour la Défense du Peuple* (CNDP) yang merasa dianaktirikan dan dikhianati oleh pemerintah pusat terkait integrasi mereka ke dalam militer nasional FARDC (Lawal, 2024). Kebangkitan mereka pada periode 2021-2025 menunjukkan peningkatan kapasitas militer yang cukup besar, sering kali dikaitkan dengan dukungan eksternal meskipun dibantah secara resmi oleh pihak terkait.

Dari perspektif teori *Grievance*, M23 membangun narasinya sebagai pelindung etnis Tutsi dan kelompok minoritas berbahasa Rwanda di Kivu Utara dan mereka mengeklaim bahwa pemberontakan ini adalah bentuk pertahanan diri terhadap ancaman kelompok milisi seperti FDLR (milisi Hutu) serta upaya menuntut implementasi perjanjian damai yang menjamin keamanan di wilayah perbatasan Rwanda (UN Security Council, 2024). Namun, narasi identitas ini sering kali berbenturan dengan kenyataan di lapangan mengenai pengungsian massal warga sipil yang justru disebabkan oleh agresi mereka sendiri.

Sedangkan presoektif teori Greed mengungkapkan bahwa motivasi utama keberlangsungan operasional M23 terletak pada penguasaan sumber daya alam strategis. Kelompok ini secara sistematis menguasai wilayah-wilayah kunci, termasuk pusat pertambangan artisanal coltan di Rubaya. Penguasaan atas akses tambang ini diperkirakan menghasilkan pendapatan sekitar $800.000 per bulan melalui skema perpajakan ilegal dan kontrol jalur distribusi mineral (Abcglobalcommunications.co.uk, 2025). Keuntungan finansial ini tidak hanya mendanai persenjataan canggih mereka, tetapi juga memperkuat posisi tawar kelompok tersebut dalam meja negosiasi internasional, menjadikannya salah satu ancaman paling persisten terhadap kedaulatan RDK dalam lima tahun terakhir.

Pada Januari 2025, kelompok bersenjata M23 meluncurkan serangan skala besar yang berhasil menembus pertahanan kota Goma, menyebabkan krisis kemanusiaan yang menghancurkan di mana sedikitnya 2.900 orang tewas dan lebih dari 480.000 warga sipil terpaksa mengungsi (Devine, 2025). Serangan ini mencapai puncaknya pada 27 Januari 2025,

ketika pemberontak yang diduga kuat didukung oleh pasukan Rwanda (RDF) mengambil alih kontrol operasional sebagian besar kota, memicu kerusuhan massa di ibu kota Kinshasa serta menyebabkan rusaknya infrastruktur vital seperti bandara dan pasokan listrik (Ohchr.org, 2025).

***Allied Democrat Force* (ADF)**

Allied Democratic Forces (ADF) telah mengalami transformasi radikal dari sekadar kelompok pemberontak asal Uganda yang didirikan tahun 1991 menjadi ancaman terorisme transnasional yang paling mematikan di wilayah Timur Republik Demokratik Kongo (RDK) (Serwat, 2025). evolusi ini semakin nyata sejak mereka secara resmi mengonsolidasikan diri sebagai bagian dari Negara Islam Provinsi Afrika Tengah (ISCAP atau ISIS di Afrika). Pergeseran ini mengubah pola serangan mereka dari taktik gerilya konvensional menjadi aksi teror yang sangat brutal, termasuk penggunaan bom rakitan (IED) di pusat keramaian dan pemenggalan massal warga sipil. Meskipun operasi militer bersama antara tentara Kongo (FARDC) dan Uganda (UPDF) melalui Operasi Shujaa yang telah diluncurkan pada November 2021, ADF tetap mampu beradaptasi dengan memindahkan basis operasi mereka ke wilayah hutan yang lebih dalam di Kivu Utara dan Ituri (adf-magazine.com, 2025).

Dampak kekerasan yang ditimbulkan oleh ADF mencapai puncaknya pada tahun 2024, di mana kelompok ini bertanggung jawab atas lebih dari 1.600 korban jiwa, menjadikannya kelompok bersenjata dengan jumlah korban sipil tertinggi di kawasan tersebut (Serwat, 2025). Motivasi mereka kini didorong oleh narasi ideologis ekstremisme global, yang dalam teori *Grievance* dimanifestasikan melalui penolakan total terhadap otoritas negara dan upaya mendirikan tatanan berdasarkan interpretasi radikal mereka. Namun, keberlangsungan hidup ADF juga sangat bergantung pada faktor *Greed* melalui jaringan ekonomi gelap. Mereka mengandalkan pendanaan dari perdagangan kayu ilegal, penambangan emas berskala kecil, serta penculikan untuk tebusan yang terhubung dengan jaringan keuangan ISIS di luar negeri (Caleb Weiss, Ryan O'Farrell, Tara Candland, 2023).

***Cooperative for the Development of the Congo* (CODECO)**

Cooperative for the Development of Congo (CODECO) merupakan kelompok bersenjata yang unik karena strukturnya yang longgar dan berbasis etnis di Provinsi Ituri. Secara historis, CODECO berfungsi sebagai payung bagi berbagai milisi dari etnis Lendu yang muncul kembali secara masif sejak tahun 2017 untuk melawan apa yang mereka persepsikan sebagai dominasi etnis Hema (Lawal, 2024). Dalam kerangka teori *Grievance*, motivasi utama mereka berakar pada konflik agraria dan perebutan akses lahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Masyarakat Lendu merasa dianaktirikan secara ekonomi dan politik, sehingga CODECO memosisikan diri sebagai gerakan pertahanan diri untuk merebut kembali hak-hak leluhur mereka dari kontrol etnis Hema dan pihak pemerintah. Ketegangan komunal ini sering kali berujung pada serangan brutal terhadap kamp-kamp pengungsian internal (IDP) yang dihuni oleh warga sipil (hrw.org, 2023).

Di sisi lain, operasional CODECO sangat dipengaruhi oleh motif *Greed* yang berpusat pada kontrol sumber daya alam di Ituri Timur. Kelompok ini secara sistematis menguasai wilayah-wilayah "sabuk emas" dan menjalankan praktik penambangan ilegal sebagai sumber pendanaan utama untuk membeli persenjataan dan logistik. Kepentingan ekonomi ini menciptakan dinamika di mana kekerasan etnis sering kali digunakan sebagai alat untuk mengusir penduduk lokal dari wilayah yang kaya mineral agar milisi dapat mengamankan akses ke tambang tersebut. Meskipun telah ada beberapa upaya dialog perdamaian di tingkat lokal, ketergantungan CODECO pada pendapatan dari emas ilegal membuat mereka enggan untuk melakukan pelucutan senjata sepenuhnya, karena hal tersebut berarti kehilangan sumber kekuasaan ekonomi mereka (UN Security Council, 2024).

Ketiga kelompok bersenjata utama di wilayah Timur RDK menunjukkan karakteristik operasional yang berbeda namun saling memperparah instabilitas kawasan melalui mekanisme

Greed dan *Grievance*. M23 menonjol sebagai kekuatan militer paling terorganisir dengan struktur komando menyerupai tentara reguler, yang fokus pada penguasaan wilayah strategis di Kivu Utara demi kontrol mineral industri seperti coltan. Sebaliknya, ADF telah bertransformasi menjadi entitas terorisme transnasional yang tidak lagi mengejar penguasaan wilayah secara politik, melainkan fokus pada penyebaran ideologi ekstremis melalui aksi kekerasan massal yang menjadikannya kelompok paling mematikan bagi warga sipil. Sementara itu, CODECO tetap bersifat lokal dan fragmentaris, dengan kekuatan yang bersumber pada mobilisasi etnis Lendu di Ituri, di mana kekerasan mereka lebih bersifat komunal dan sangat bergantung pada ekstraksi emas ilegal untuk bertahan hidup.

Secara ekonomi, terdapat perbedaan yang cukup besar dalam sumber pendanaan yang menopang eksistensi mereka. M23 mengandalkan pendapatan besar dari tambang artisanal Rubaya yang terintegrasi dalam rantai pasok mineral global, sedangkan ADF memanfaatkan jaringan pendanaan gelap internasional dan perdagangan kayu ilegal di sepanjang perbatasan Uganda. Di sisi lain, CODECO sangat bergantung pada ekonomi emas tradisional yang hasilnya langsung digunakan untuk mendanai milisi tingkat desa. Dari sisi naratif keluhan (*grievance*), M23 menggunakan isu diskriminasi etnis Tutsi dan keamanan perbatasan, CODECO menggunakan isu ketimpangan hak agraria bagi etnis Lendu, sementara ADF menggunakan narasi jihadisme global sebagai legitimasi atas kekerasan yang mereka lakukan.

Pengaruh *Greed* Dan *Grievance* Terhadap Keamanan Nasional

Faktor *Greed*

kontrol atas tambang artisanal bukan sekadar dampak dari perang, melainkan tujuan utama dari eksistensi kelompok bersenjata. M23 telah mengonsolidasikan kekuatannya di Kivu Utara dengan menguasai pusat produksi coltan di Rubaya, yang menyumbang persentase signifikan dari produksi nasional. Pendapatan yang dihasilkan dari skema perpajakan ilegal di wilayah ini menjadi modal utama untuk pengadaan senjata canggih dan teknologi pengawasan. Di Ituri, CODECO memanfaatkan tambang emas rakyat sebagai sumber likuiditas instan; emas mudah diselundupkan dan sulit dilacak, memberikan kemampuan bagi milisi untuk membeli loyalitas pemuda lokal di tengah kemiskinan ekstrem. Sementara itu, ADF mengintegrasikan ekstraksi sumber daya dengan jaringan kriminal terorganisir untuk mendanai operasional terorisme transnasional mereka (Insecurity Insight, 2025).

Keberlangsungan operasional kelompok bersenjata sangat bergantung pada jaringan perdagangan ilegal yang menghubungkan tambang di pedalaman Kongo dengan pasar internasional melalui negara tetangga seperti Rwanda dan Uganda. Hubungan simbiosis antara pemimpin milisi dan jaringan penyelundup menciptakan insentif ekonomi yang kuat untuk menjaga status quo konflik. Mineral hasil konflik sering kali dicuci dengan kata lain dipalsukan asalnya di pusat-pusat perdagangan regional sebelum diekspor ke pasar global, yang secara efektif menyamarkan asal-usulnya. Laporan PBB menunjukkan bahwa peningkatan volume ekspor emas dan coltan dari negara tetangga yang tidak memiliki cadangan sumber daya sebesar itu mengindikasikan kuatnya arus mineral ilegal dari wilayah yang dikuasai pemberontak (UN Security Council, 2024). Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana keuntungan ekonomi digunakan untuk memperpanjang kekerasan yang menjamin akses berkelanjutan ke sumber daya tersebut.

RDK tetap menjadi contoh nyata dari kutukan sumber daya (*resource curse*), di mana kelimpahan mineral justru berkorelasi negatif dengan stabilitas dan kemakmuran nasional. Fenomena ini terjadi karena struktur ekonomi mineral di Timur RDK bersifat ekstraktif dan dikelola secara informal, yang melemahkan otoritas negara dan memperkuat ekonomi bayangan. Alih-alih menjadi modal pembangunan, mineral berharga seperti kobalt dan coltan yang sangat dibutuhkan untuk transisi energi global justru memicu kompetisi berdarah antar aktor non-negara. Absennya tata kelola tambang yang transparan dan penegakan hukum yang lemah menyebabkan kekayaan alam ini hanya dinikmati oleh elit bersenjata dan jaringan

perdagangan gelap, sementara masyarakat lokal terjebak dalam siklus kemiskinan dan perpindahan paksa akibat pertempuran memperebutkan akses tambang.

Faktor *Grievance*

Masalah *grievance* di RDK berakar pada fragmentasi identitas etnis yang mendalam dan sengketa agraria yang belum terselesaikan, terutama di wilayah timur dan sentimen etnisitas menjadi motor penggerak utama bagi kelompok seperti CODECO, yang merepresentasikan etnis Lendu dalam konflik berdarah melawan komunitas Hema di Provinsi Ituri. Sepanjang tahun 2024, ketegangan ini memuncak pada serangan terhadap warga sipil dan perebutan lahan di sekitar tambang emas, yang memperpanjang siklus dendam sejarah antar-etnis. Selain itu, kelompok M23 memanfaatkan narasi perlindungan etnis Tutsi Kongo dari diskriminasi untuk melegitimasikan agresi militer mereka di Kivu Utara dan pada awal 2025, eskalasi serangan M23 di Goma menunjukkan bagaimana sentimen ini digabungkan dengan kekuatan militer untuk menguasai wilayah strategis, yang mengakibatkan sedikitnya 2.900 orang tewas dan ratusan ribu warga sipil kehilangan tempat tinggal serta akses terhadap tanah mereka (news.un.org, 2025).

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat semakin memperburuk keadaan akibat persepsi marjinalisasi yang sistematis dan masyarakat lokal merasa pemerintah gagal memberikan perlindungan nyata, karena kehadiran militer FARDC justru sering kali diiringi dengan laporan pelanggaran HAM, termasuk penembakan di kamp pengungsian dan pelecehan seksual. Kondisi ini menciptakan kekosongan legitimasi di mana kelompok bersenjata seperti ADF memanfaatkan marjinalisasi komunitas tertentu, seperti komunitas Muslim di perbatasan, untuk merekrut anggota melalui janji keadilan ideologis (Caleb Weiss, Ryan O'Farrell, Tara Candland, 2023). Ketidakmampuan negara dalam menyediakan layanan dasar dan keamanan selama periode 2023-2025 telah memperkuat persepsi bahwa pemerintah pusat abai terhadap penderitaan di wilayah Timur, sehingga mendorong masyarakat untuk mencari perlindungan pada milisi lokal (Wazalendo) yang justru menambah kompleksitas konflik nasional (ohchr.org, 2025).

Dampak terhadap Keamanan Nasional (Perspektif Barry Buzan)

Dalam buku *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era by* Barry Buzan (1991), melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman tradisional keamanan yang sebelumnya didominasi oleh paradigma realisme yang berpusat pada kekuatan militer negara (*state-centric military power*). Buzan memperkenalkan konsep Keamanan Komprehensif yang memandang keamanan nasional sebagai fenomena multidimensional yang mencakup lima sektor utama: militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui pendekatan ini, Buzan menegaskan bahwa ancaman terhadap eksistensi negara tidak hanya berasal dari agresi bersenjata eksternal, melainkan juga dari kerentanan internal yang dapat melumpuhkan struktur negara secara keseluruhan, Buzan memberikan juga membedakan karakteristik antara Negara Kuat (*Strong States*) dan Negara Lemah (*Weak States*) (Buzan, 1991).

Dalam perspektif Barry Buzan, Republik Demokratik Kongo (RDK) dikategorikan sebagai *Weak State* (Negara Lemah) karena ketidakmampuannya dalam membangun konsensus politik yang kokoh dan kegagalan dalam memonopoli penggunaan kekerasan sah.

Dalam sektor militer dan politik, RDK menunjukkan rendahnya kohesi sosial-politik dan kegagalan legitimasi pemerintah di wilayah Timur. Kebijakan *State of Siege* (Darurat Militer) yang diberlakukan sejak Mei 2021 di Kivu Utara dan Ituri dinilai gagal meredam kekerasan, karena kelompok bersenjata justru mengintensifkan serangan sebagai respons atas tekanan militer tersebut (International, 2022). Konflik antara kelompok M23 dengan pasukan nasional (FARDC) mencapai titik kritis pada Januari 2025, ketika M23 berhasil menembus pertahanan kota Goma dan mengambil alih kontrol operasional wilayah strategis, termasuk bandara (Devine, 2025). Hal ini memperlihatkan kelumpuhan otoritas negara dan

ketidakmampuan FARDC dalam melindungi pusat populasi utama, yang menurut Buzan, menyebabkan negara kehilangan esensi kedaulatannya meskipun secara legal masih diakui internasional.

Pada sektor ekonomi, terjadi komersialisasi konflik yang masif melalui eksploitasi mineral strategis seperti emas, kobalt, dan tembaga. Kelompok bersenjata bertindak layaknya organisasi kriminal yang memanfaatkan ekspor komoditas primer untuk pendanaan militer, seperti M23 yang menguasai tambang artisanal coltan di Rubaya dengan pendapatan mencapai $800.000 per bulan. Pendudukan wilayah strategis oleh milisi tidak hanya mengganggu jalur logistik nasional tetapi juga menciptakan "ekonomi predatoris" (sistem di mana elit ekonomi, politik, atau militer memonopoli sumber daya dan kebijakan untuk memperkaya diri) yang mengawetkan kekerasan demi penguasaan tambang ilegal, sehingga menghapus insentif untuk perdamaian (Abcglobalcommunications.co.uk, 2025).

Sektor sosial dan lingkungan mengalami tekanan ekstrem akibat pelanggaran HAM berat dan ancaman terhadap ekosistem. Sepanjang tahun 2024, serangan artileri oleh M23 dan pasukan Rwanda di kamp pengungsian dekat Goma telah menewaskan warga sipil, termasuk 15 anak-anak dalam satu insiden pada Mei 2024 (Hrw.org, 2024). Selain pembunuhan massal, penduduk kamp juga menghadapi risiko pelecehan seksual dan rekrutmen paksa tentara anak. Di sisi lain, kelestarian lingkungan di wilayah seperti Taman Nasional Virunga terancam oleh aktivitas milisi seperti M23 mengeksploitasi Taman Nasional Virunga, yang merupakan taman nasional tertua di Afrika, sebagai basis pertahanan dan sumber ekonomi ilegal. Aktivitas kelompok ini mencakup pembangunan tambang ilegal di dalam kawasan lindung yang merusak ekosistem hutan hujan tropis serta perburuan satwa liar yang terancam punah untuk konsumsi milisi. Selain itu, pertempuran yang terjadi di dalam wilayah taman nasional tidak hanya menghancurkan keanekaragaman hayati tetapi juga melumpuhkan upaya konservasi internasional, mengingat Virunga merupakan rumah bagi gunung berapi aktif yang berbahaya dan spesies langka. Ketidakmampuan negara untuk melindungi tatanan ekologis ini menegaskan status RDK sebagai weak state yang kedaulatannya atas sumber daya lingkungan telah dirampas oleh aktor non-negara (Vivienne Nunis, 2021). Ketidakmampuan negara dalam melindungi identitas kolektif dan kekayaan alam ini mempertegas status RDK sebagai *weak state* yang mengalami ancaman eksistensial multidimensional.

KESIMPULAN

Konflik berkepanjangan di Republik Demokratik Kongo (RDK) selama periode 2021-2025 dipicu oleh perpaduan antara keserakahan ekonomi (Greed) dan dendam sosial (Grievance). Kelompok bersenjata seperti M23, ADF, dan CODECO memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah, seperti emas dan coltan, untuk membiayai operasi militer mereka melalui tambang ilegal. Di saat yang sama, luka sejarah akibat diskriminasi etnis dan perebutan lahan menjadi alasan bagi kelompok-kelompok ini untuk terus mengangkat senjata dan menarik dukungan dari masyarakat yang merasa tidak diadili oleh pemerintah.

Kondisi ini menciptakan krisis kemanusiaan yang sangat berat bagi warga sipil di wilayah Timur RDK. Serangan brutal, pengeboman kamp pengungsian, hingga penculikan telah menyebabkan ribuan nyawa melayang dan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Kelompok seperti ADF bahkan telah berevolusi menjadi ancaman terorisme global, sementara kelompok lain seperti M23 berhasil menguasai kota strategis dan melumpuhkan infrastruktur penting seperti bandara dan jaringan listrik.

Secara keseluruhan, RDK saat ini berada dalam posisi sebagai "negara lemah" karena pemerintah pusat gagal memberikan keamanan dan layanan dasar bagi rakyatnya. Kekayaan alam yang seharusnya membawa kemakmuran justru menjadi kutukan yang memicu perebutan kekuasaan dan merusak lingkungan, termasuk taman nasional tertua di Afrika. Tanpa penyelesaian pada akar masalah ekonomi dan keadilan antar etnis, stabilitas nasional RDK

akan terus terancam oleh dominasi kelompok bersenjata.

REFERENSI

aacrao.org. (2025). *Democratic Republic of Congo*. Aacrao.Org. https://www.aacrao.org/edge/country/congo-democratic-republic-of

Abcglobalcommunications.co.uk. (2025). *DRC-North kivu: mineral greed, a battleground for conflicts and economic interests*. Abcglobalcommunications.Co.Uk. https://abcglobalcommunications.co.uk/drc-north-kivu-mineral-greed-a-battleground-for-conflicts-and-economic-interes

adf-magazine.com. (2025). *IS-Affiliated Group in Eastern DRC Leverages Chaos to Expand Operations*. Adf-Magazine.Com. https://adf-magazine.com/2025/10/is-affiliated-group-in-eastern-drc-leverages-chaos-to-expand-operations/#:~:text=In early January 2025%2C the,as taxi drivers and merchants.

bbc.com. (2025). *DR Congo country profile*. Bbc.Comcom. https://www-bbc-com.translate.goog/news/world-africa-13283212?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

Britannica.com. (2025). *Belgian Congo historical region, Africa*. Britannica.Com. https://www.britannica.com/place/Belgian-Congo

Buzan, B. (1991). *People , States , and Fear The National Security Relations*.

Caleb Weiss, Ryan O'Farrell, Tara Candland, L. P. (2023). *Fatal Transaction: The Funding Behind the Islamic State's Central Africa Province*. Extremism.Gwu.Edu. https://extremism.gwu.edu/fatal-transaction#:~:text=In line with this framework,Congo to a regional threat.

Collier, P. (2000). *Greed and Grievance in Civil W ar*.

Devine, W. (2025). *A terrifying escalation in Goma*. Reliefweb.Int. https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/terrifying-escalation-goma

Gulo, S. J., Seba, R. O. C., & Fretes, C. H. J. De. (2024). Peran Negara dan MONUSCO dalam Pemenuhan Keamanan Personal Masyarakat Republik Demokratik Kongo Tahun 2021-2022. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(10), 11623–11634. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.6012

hrw.org. (2023). *DR Congo: Deadly Militia Raid on Ituri's Displaced*. Hrw.Org. https://www.hrw.org/news/2023/07/24/dr-congo-deadly-militia-raid-ituris-displaced

Hrw.org. (2024). *DR Congo: Rwandan Forces, M23 Rebels Shell Civilians*. Hrw.Org. https://www.hrw.org/news/2024/09/26/dr-congo-rwandan-forces-m23-rebels-shell-civilians

Insecurity Insight. (2025). *Chronic Insecurity How Armed Groups Undermine Food Security in Ituri and North Kivu Provinces, Democratic Republic of the Congo*. *February*.

International, A. (2022). *DRC : JUSTICE AND FREEDOMS UNDER SIEGE IN NORTH-KIVU AND ITURI*. *L*.

Lawal, S. (2024). *A guide to the decades-long conflict in DR Congo*. Aljazeera.Com. https://www.aljazeera.com/news/2024/2/21/a-guide-to-the-decades-long-conflict-in-dr-congo

news.un.org. (2025). *Hospitals overwhelmed in DR Congo, food running out: Goma faces 'devastation.'* News.Un.Org. https://news.un.org/en/story/2025/01/1159631

ohchr.org. (2025). *DRC: UN report raises spectre of war crimes and crimes against humanity in North and South Kivu*. Ohchr.Org. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/09/drc-un-report-raises-spectre-war-crimes-and-crimes-against-humanity-north#:~:text=Building from those conclusions%2C the,being used for sexual purposes.

Ohchr.org. (2025). *DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO : Summary report on the*

situation in North and South Kivu Provinces. *September*, 3–5.

Pizzolo, P. (2020). *The Greed versus Grievance Theory and the 2011 Libyan Civil War: Why grievance offers a wider perspective for understanding the conflict outbreak*. Smallwarsjournal.Com. https://smallwarsjournal.com/2020/10/29/greed-versus-grievance-theory-and-2011-libyan-civil-war-why-grievance-offers-wider/

Serwat, L. (2025). *As M23 rebels take hold of eastern Congo, the Islamic State is capitalizing on the chaos*. Acleddata.Com. https://acleddata.com/report/m23-rebels-take-hold-eastern-congo-islamic-state-capitalizing-chaos

Titi, P. D. (2024). *PERAN RWANDA DALAM MENDUKUNG PEMBERONTAKAN KELOMPOK M23 DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO 2012-2024*.

UN Security Council. (2024). *Final report of the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo*. *07709*(June).

Vivienne Nunis, S. T. (2021). *Bertaruh nyawa demi lindungi gorila: Kisah penjaga taman nasional Virunga di Kongo*. Bbc.Com. https://www.bbc.com/indonesia/majalah-56267524

Yuliani, W. (2018). *METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING*. *2*(2), 83–91. https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497